



EVALUASI RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021, disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi .

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Mengacu ketentuan diatas, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah melalui pengendalian dan evaluasi Renja sebagai instrumen dalam pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan selain evaluasi hasil pelaksanaan Renja dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi dan tolok ukur penilaian kinerja pada unit kerja pelaksana program dan kegiatan evaluasi hasil akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Renja periode mendatang.

Kami menyadari dalam penyusunan evaluasi hasil Renja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Balikpapan, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan,



Andi Sri Juliarty

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II RENCANA KERJA TAHUN 2021.....	3
2.1 Tujuan, Sasaran, Prgram dan Kegiatan.....	3
2.2 Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Renja Perangkat Daerah.....	5
BAB III CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1 Penjabaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja yang Telah dilaksanakan.....	32
BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA.....	40
4.1 Faktor Pendorong.....	40
5.2 Faktor Penghambat.....	40
BAB V PENUTUP.....	41
5.1. Kesimpulan.....	41
5.2 Rekomendasi.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pelayanan dasar pada tatalaksana pemerintahan daerah. Proses perencanaan pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu upaya menata daerah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk memastikan sinergitas antara dokumen perencanaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusunlah Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021 antara lain :

- a. Menjalankan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- b. Menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam Renja tahun 2021;
- c. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran rencana kerja, rencana program/kegiatan, indicator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- d. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja Tahun 2021 dan Renstra 2016-2021.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Renja tahun 2021.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan bidang kesehatan.

BAB II

RENCANA KERJA TAHUN 2021

2.1 Tujuan, Sasaran, Prgram dan Kegiatan

Adapun tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
2. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Merata dan Berkualitas
3. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan Kematian
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Promosi Kesehatan

Adapun keterkaitan tujuan dan sasara Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	60/100.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat : - Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	1/1.000 KH	
		Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	2/1.000 KH	
		Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk	%	<3	
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau,	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional	%	90%	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat : - Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Merata dan Berkualitas		Persentase RS yang Terakreditasi Nasional	%	85%	<p>Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <p>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <p>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 	
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	%	90%		
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	90%		
		Persentase Ketersediaan SDM Puskesmas	%	90%		
		Persentase Ketersediaan SDM Rumah Sakit	%	90%		
Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan Kematian		Persentase Angka Kesakitan	%	98,35%	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	
		Prevalensi HIV dan AIDS	%	<1		
		Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk	Per 100.00 Penduduk			250/100.000
		Prevalensi TBC	Per 100.000 Penduduk			140/100.000
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Promosi Kesehatan	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	%	100%	<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	
		Cakupan UKBM Aktif	%	70%		

2.2 Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan yang erat dan bersifat realistis, tepat sasaran dan konsisten.

Keterkaitan perencanaan dan penganggaran tercermin melalui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Output atau hasil akhir dari proses perencanaan pembangunan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangatlah penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah.

Ketidakesuaian antara dokumen perencanaan dengan APBD akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam APBD sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sia-sia, tidak jelas dan mengakibatkan pemborosan anggaran.

2.1.1 Konsistensi antara Program/Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.2

Konsistensi antara Program/Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

RENSTRA 2016 - 2021		RENJA 2021			
No	Program/Kegiatan	No	Program/Kegiatan	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020
1	3	6			
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota
1	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja Olahraga	1	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja Olahraga	Jumlah Pekerja Non Formal yang dilayani	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
2	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	2	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (BOK)-DAK		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (BOK)-DAK	Persentase SPM Kesehatan	
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas (BOK)-DAK		Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas (BOK)-DAK	Persentase SPM Kesehatan	

3	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	3	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Jumlah pelayanan di UPT Labkesda	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK	4	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK	Jumlah layanan di UPT IFK dan pelayanan pendistribusian obat dan BMHP bagi puskesmas	
5	Distribusi Obat dan e-logistik (BOK) DAK	5	Distribusi Obat dan e-logistik (BOK) DAK	Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi e-logistik	
6	Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan	6	Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan	Jumlah Anak Sekolah dan Masyarakat yang dilayani	Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
7	Pelayanan Kesehatan Mata	7	Pelayanan Kesehatan Mata	Jumlah pasien yang dilakukan deteksi dini kesehatan mata	
8	Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	8	Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Jumlah jemaah haji yang dilakukan pemeriksaan	
9	Pembayaran Klaim Visum Polres	9	Pembayaran Klaim Visum Polres	Jumlah verifikasi berkas klaim visum	
10	Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Traffcking di Puskesmas	10	Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Traffcking di Puskesmas	Jumlah kasus KDRT, KTP, KTA dan Traffcking di Puskesmas yang dilayani	
11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah kasus pra hospital dan P3K yang mendapatkan pelayanan	
12	Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	12	Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	Jumlah Puskesmas dengan penerapan TOGA	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

13	Pelayanan Kesehatan Jiwa	13	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
14	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	14	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	Jumlah kasus KLB dan Bencana	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
15	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	15	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
16	Penyehatan Lingkungan	16	Penyehatan Lingkungan	Jumlah Kelurahan yang STBM	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
17	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular)	17	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular)	Persentase Penderita PTM yang dilayani	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase SPM Kesehatan	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
19	Peningkatan Gizi Masyarakat	19	Peningkatan Gizi Masyarakat	Persentase kasus gizi kurang dan gizi buruk yang dilayani	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
20	Peningkatan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA	20	Peningkatan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA	Penanganan pelayanan pasien ketergantungan NAPZA	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
					Kegiatan Penebitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga

21	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan Makanan	21	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan Makanan	Jumlah Sarana yang dilakukan pemeriksaan	Sub Kegiatan Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produksi
II	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	II	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
					Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota
1	Peningkatan Imunisasi	1	Peningkatan Imunisasi	Persentase imunisasi dasar lengkap bayi 0 - 11 bulan	Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
2	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	2	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Persentase kasus yang dilakukan PE	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
3	Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS, HIV/AIDS	3	Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS, HIV/AIDS	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
4	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)	4	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis
5	Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis	5	Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis	Persentase Kasus DBD yang dilayani	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
III	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	III	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan

					Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota
1	Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)		Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)	Jumlah Peserta PBI	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
IV	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	IV	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		
1	Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK)	1	Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK)	Jumlah Peserta Jampersal yang dilayani	
2	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	2	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase SPM Kesehatan	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah anak berkebutuhan khusus yang dilayani	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
V	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana Prasarana Kesehatan	V	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana Prasarana Kesehatan		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
					Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis SDM Tingkat Daerah Kab/Kota

1	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan	1	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan	Jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
					Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota
2	Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan	2	Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah SIP tenaga kesehatan	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
					Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah Sarana dan Prasarana	Sub kegiatan Pembangunan Puskesmas
					Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota
4	Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan	4	Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang diakreditasi	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
					Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota
5	Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan	5	Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan	Jumlah Kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

6	Pengadaan Obat dan BMHP	6	Pengadaan Obat dan BMHP	Jumlah pengadaan obat, BMHP, dan reagen	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
					Kegiatan Penerbitan Izin RS Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
7	Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD	7	Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD	Jumlah UPTD dengan penerapan PPK BLUD	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
8	Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	8	Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Jumlah kategori puskesmas berprestasi	
9	Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)				
					Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota
10	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)	9	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)	Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
11	Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas				
					Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

12	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	10	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	Jumlah UPTD yang menggunakan sistem informasi kesehatan	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
13	Manajemen Desentralisasi	11	Manajemen Desentralisasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
VI	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	VI	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 Tahun	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	4	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun	
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya Nasi Kotak/Snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan untuk kegiatan administrasi dalam 1 tahun	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik per tahun	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kepala dinas, sekretaris, 4 kepala bidang dan umum	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah	10	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang ditugaskan rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1	Pemerlihaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	Pemerlihaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Pemerlihaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2	Pemerlihaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
VIII	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	VIII	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat		
					Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD	1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
IX	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)				

Berdasarkan tabel di atas, penamaan Program dan Kegiatan antara Renstra 2016-2021 dan Renja 2021 mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur, dimana Renstra 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyusunan Renja 2021 berdasarkan hasil pemetaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Meskipun terjadi perubahan nomenklatur antara Renstra 2016-2021 dengan Renja 2021, indikator tidak mengalami perubahan, sehingga dilakukan pemetaan untuk menyesuaikan hal tersebut.

Selain itu terdapat program dan kegiatan Renstra 2016-2021 yang tidak di akomodir pada Renja 2021, dikarenakan target kinerjanya dapat dicapai dengan dukungan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.2 Konsistensi antara Renja Perangkat Daerah dengan APBD Tahun 2021

Pada saat penyusunan APBD 2021, pedoman yang digunakan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, serta mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.3

Konsistensi antara Renja Perangkat Daerah dengan APBD Tahun 2021

Renja Perubahan Tahun 2021			DPPA TA 2021		
No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	No.	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	177.997.504.754	A.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	177.997.504.754

I.	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA	40.722.867.500	I.	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA	40.722.867.500
1	Pembangunan Puskesmas	7.850.000.000	1	Pembangunan Puskesmas	7.850.000.000
2	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.926.248.500	2	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.926.248.500
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.074.139.000	3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.074.139.000
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	700.000.000	4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	700.000.000
5	Pengadaan Obat, Vaksin	5.921.316.350	5	Pengadaan Obat, Vaksin	5.921.316.350
6	Pengadaan Bahan Habis Pakai	15.251.163.650	6	Pengadaan Bahan Habis Pakai	15.251.163.650
II.	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	136.050.314.004	II.	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	136.050.314.004
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	711.598.350	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	711.598.350
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.379.725.500	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.379.725.500
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	196.035.000	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	196.035.000
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	523.025.950	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	523.025.950
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	289.165.950	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	289.165.950
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	78.649.000	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	78.649.000
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	554.527.500	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	554.527.500
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	3.675.000	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	3.675.000
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	300.000	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	300.000
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	144.542.500	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	144.542.500
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	468.891.350	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	468.891.350
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	353.740.946	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	353.740.946
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	6.244.186.525	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	6.244.186.525
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi Bencana	7.395.399.420	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi Bencana	7.395.399.420

16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.361.932.050	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.361.932.050
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	226.277.000	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	226.277.000
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.029.588.014	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.029.588.014
19	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.307.854.750	19	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.307.854.750
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	178.890.000	20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	178.890.000
21	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.399.999.970	21	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.399.999.970
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.000.000	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.000.000
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	305.939.612	23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	305.939.612
24	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	3.991.508.513	24	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	3.991.508.513
25	Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	317.710.250	25	Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	317.710.250
26	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.048.022.986	26	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.048.022.986
27	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	55.457.222.360	27	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	55.457.222.360
28	Operasional Pelayanan Puskesmas	27.533.623.260	28	Operasional Pelayanan Puskesmas	27.533.623.260
31	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.410.264.908	31	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.410.264.908
32	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.042.777.000	32	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.042.777.000
33	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	8.093.240.340	33	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	8.093.240.340
III.	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	886.323.250	III.	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	886.323.250
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	586.323.250	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	586.323.250
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	300.000.000	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	300.000.000
IV.	PENERBITAN IZIN RS KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	338.000.000	IV.	PENERBITAN IZIN RS KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	338.000.000
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	338.000.000	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	338.000.000
B.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.749.201.500	B.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.749.201.500
I.	PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KAB/KOTA	200.000.000	I.	PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KAB/KOTA	200.000.000

1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	200.000.000	1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	200.000.000
ii.	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	10.907.500.000	ii.	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	10.907.500.000
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	10.907.500.000	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	10.907.500.000
iii.	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SDM TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	641.701.500	iii.	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SDM TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	641.701.500
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia	641.701.500	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia	641.701.500
c.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	382.683.500	c.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	382.683.500
i.	PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	40.715.000	i.	PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	40.715.000
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.340.000	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.340.000
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.375.000	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.375.000
ii.	PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR PIRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	247.842.500	ii.	PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR PIRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	247.842.500
1	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produksi	247.842.500	1	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produksi	247.842.500

III.	PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	94.126.000	III.	PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	94.126.000
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	94.126.000	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	94.126.000
D.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.744.359.575	D.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.744.359.575
I.	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN< KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	2.925.442.000	I.	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN< KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	2.925.442.000
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.925.442.000	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.925.442.000
II.	PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	818.917.575	II.	PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	818.917.575
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	818.917.575	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	818.917.575
E.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	102.517.850.758	E.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	102.517.850.758
I.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.819.958.150	I.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.819.958.150
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DKK dan Puskesmas)	88.819.958.150	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DKK dan Puskesmas)	88.819.958.150
II.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.640.538.000	II.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.640.538.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.050.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.050.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	537.350.000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	537.350.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.553.138.000	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.553.138.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	265.000.000	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	265.000.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000
III.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.358.604.608	III.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.358.604.608
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	758.604.608	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	758.604.608

IV.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.698.750.000	IV.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.698.750.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.733.800.000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.733.800.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.095.000.000	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.095.000.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	719.950.000	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	719.950.000
		296.391.600.087			296.391.600.087

BAB III

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai berikut :

1. Sangat Tinggi : ≥ 90
2. Tinggi : ≥ 75
3. Sedang : ≥ 65
4. Rendah : ≥ 50
5. Sangat Rendah : < 50

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, maka capaian kinerja Renja Dinas Kesehatan pada akhir tahun 2021, adalah sebagaimana tabel berikut

:

Tabel 3.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Peranggung jawab	Penjelasan
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	- Proporsi Kelahiran Yang Dibantu Tenaga Kesehatan Terlatih - Angka Kematian Bayi - Angka Kematian Balita - Angka Kematian Ibu - Prevalensi HIV dan AIDS - Menurunnya Angka Kejadian DBD - Menurunnya Prevalensi TBC - Persentase Jiwa Keluarga Miskin Yang Memperoleh Jaminan Layanan Kesehatan (PBI - APBD)	100	366.129.426.000	166.921.077.341	20 1 2 60 -1 250 140	96.006.626.000	6.067.373.806	6.696.341.179	17.563.162.843	76.617.796.819	104.184.263.647	364.723.263.346													

		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP - KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Puskesmas		36.360.000.000		30.816.636.080		7.000.000.000		-		-	1.278.826.711,28		4.426.673.236,19	0	5.705.399.007,47	0%	82%	0	36.820.934.067,58	0%	103,31%			
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Sarana dan Prasarana	7	35.350.000.000	11	30.816.636.080,11	1	7.000.000.000	0	-	0	-	1.278.826.711,28	1	4.426.673.236,19	1	5.705.399.007,47	100%	81,51%	12	36.520.934.067,58	171,43%	103,31%			
																			100,00%	81,51%			171,43%	103,31%			
																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
					63.074.068.000		23.430.234.290		17.000.000.000		-		-	141.832.500		3.308.776.267	0	23.068.261.728	0%	166%	0	49.967.104.788	0%	79,22%			
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perunging Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Perunging Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	49	15.500.000.000	28	2.052.867.055	20	5.000.000.000	0	-	0	-	0	20	7.105.000.810,40	20	7.105.000.810,40	100%	142,10%	48	9.157.887.885,40	97,96%	59,08%			
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah kalibrasi alat kesehatan di puskesmas	145	9.909.900.000	116	3.029.793.310	29	2.000.000.000	0	-	0	114.800.000,00	0	38.362.500,00	29	528.307.500,00	29	681.470.000,00	100%	34,07%	145	3.711.263.310,00	100,00%	37,45%		
			Jumlah pengawasan mutu Akres dan PAKIT	145		116		29		0		0		0	29		29		100%		145		100,00%				
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat, BMHP dan reagen	15	16.885.158.000	10	7.720.592.562,4	3	5.000.000.000	0	-	1	27.032.500,00	1	3.268.413.767,00	1	12.845.411.474,56	3	16.140.857.741,56	322,82%	322,82%	13	23.861.450.303,96	86,87%	143,18%		
		Pengadaan Bahan Habis Pakis	Jumlah pengadaan obat, BMHP dan reagen	15	21.000.000.000	10	10.027.181.382,7	3	5.000.000.000	0	-	0	-	0	3	2.809.541.943,00	3	2.809.541.943,00	100,00%	52,19%	13	13.236.723.305,70	86,87%	83,03%			
																			174,27%	187,60%			81,11%	103,11%			
																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP - RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN			264.143.320.000		131.499.544.737		69.756.629.000		5.076.373.006		5.443.910.679		12.877.680.966		48.069.227.769	0	71.656.073.119	0%	103%	0	196.793.560.216	0%	74,60%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase SPM Kesehatan (%)	100	5.080.333.000	75,71	2.468.741.207	20	1.500.000.000	5,16	4,45	82.291.700,00	4,39	104.387.000,00	4,85	1.146.737.575,00	19,87	1.333.416.275,00	94,35%	88,89%	94,58	3.802.157.482	94,58%	74,84%			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																										
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																										
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase SPM Kesehatan (%)	100	1.525.300.000	21,34	651.847.375	20	450.000.000	1,90	-	2,47	-	1,65	193.600.000,00	2,26	106.636.500,00	5,28	300.236.500,00	41,40%	66,72%	29,82	952.083.875,00	29,62%	62,42%		

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODG-J) (%)	100	681.400.000	55,66	130.680.032	20	250.000.000	7,47	-	3,03	-	1,81	-	2,46	55.042.500,00	14,77	55.042.500,00	73,84%	22,02%	70,428	185.722.532,00	70,43%	27,26%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB	463	1.808.800.000	301,86	542.274.605	95	600.000.000	4,37	27.285.500,00	8,25	9.750.000,00	4,54	20.642.000,00	14,88	244.381.100,00	30,04	301.758.600,00	31,62%	50,29%	331,9	844.033.205,00	71,68%	46,68%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	1.746.400.000	66,1	579.585.807	20	500.000.000	3,34	72.239.400,00	3,49	30.715.500,00	2,84	38.480.000,00	4,96	71.820.400,00	14,63	211.105.300,00	73,15%	42,22%	80,73	790.691.107,00	80,73%	45,28%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Jumlah kasus KLB dan bencana	50	1.650.300.000	52	76.038.181	10	500.000.000	0	-	1	-	0	115.420.000,00	0	1.063.264.795,00	1	1.178.684.795,00	10,00%	235,74%	53	1.254.722.976,00	100,00%	76,03%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana												3.534.391.774,00		2.727.665.867,00		6.262.057.641,00								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase kasus gizi kurang dan gizi buruk yang dilayani	100	2.223.100.000	80	1.068.752.662	20	650.000.000	5	57.579.050,00	5	183.604.000,00	5	95.692.200,00	5	1.194.862.243,00	20	1.531.737.493,00	100,00%	235,65%	100	2.800.490.155,00	100,00%	116,98%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah pekerja non formal yang dilayani (Orang)	1740	683.000.000	3618	289.372.828	500	250.000.000	1009	2.332.000,00	0	25.041.800,00	0	17.675.000,00	80	67.437.781,00	1089	112.546.581,00	217,80%	45,02%	4707	401.919.409,00	270,52%	59,11%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah keluhan yang STBM	28	4.010.035.000	15	671.901.610	7	1.500.000.000	0	18.450.000,00	0	-	0	310.675.200,00	0	727.321.921,00	0	1.056.747.121,00	0,00%	70,45%	15	1.728.648.731,00	53,57%	43,11%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	500	4.956.200.000	316	2.657.474.425	100	1.500.000.000	25	131.959.500,00	25	344.485.400,00	25	29.581.500,00	25	1.034.909.850,00	100	1.540.936.250,00	100,00%	102,73%	416	4.196.410.875,00	83,29%	84,71%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas dengan penerapan TOGA (Puskesmas)	10	684.000.000	8	116.111.341	2	200.000.000	0	11.450.000,00	0	-	0	-	2	88.632.683,00	2	100.342.883,00	100,00%	50,17%	10	216.454.024,00	100,00%	32,60%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase kasus yang dilakukan PE	5000	617.953.000	4401	429.164.895	1000	250.000.000	103	922.847.482,00	133	7.783.900,00	136	28.790.000,00	173	81.031.583,00	545	1.040.452.965,00	54,50%	416,16%	4946	1.469.617.960,00	98,92%	237,82%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jawa dan NAPZA	Penanganan pelayanan pasien ketagihan NAPZA	1750	747.600.000	438	149.990.970	450	250.000.000	22	-	22	-	27	-	19	41.755.000,00	90	41.755.000,00	20,00%	16,70%	528	191.745.970,00	30,17%	25,95%	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah pasien yang dilakukan deteksi dini kesehatan mata (Orang)	500	957.800.000	700	236.814.291	100	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	100.300.000,00	0	100.000.000,00	0,00%	33,33%	700	336.814.291,00	140,00%	35,17%	

		Jumlah verifikasi berkas klaim visum	1000	1.000.000.000	743	633.715.664	200	200.000.000	0	-	0	300.000,00	34	31.900.000,00	10	10.498.500,00	44	42.888.500,00	22,00%	21,34%	787	676.404.164,00	78,70%	67,84%
		Jumlah kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di puskesmas yang dilayani	50	553.300.000	108	185.570.146	10	175.000.000	3	-	4	-	2	-	3	25.090.000,00	12	25.080.000,00	120,00%	14,33%	120	210.650.146,00	240,00%	37,73%
		Jumlah jemaah haji yang dilakukan pemeriksaan (Orang)	3500	1.231.200.000	2109	416.422.125	700	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	2109	416.422.125,00	60,28%	33,82%
		Jumlah anak sekolah dan masyarakat yang dilayani (Orang)	18000	645.000.000	9405	266.131.739	3600	220.000.000	0	-	0	-	33	85.175.000,00	0	100.300.000,00	33	165.175.000,00	0,92%	84,17%	9438	451.306.739,00	52,43%	69,97%
		Persentase imunisasi dasar lengkap bayi 0 - 11 bulan	100	1.925.400.000	77,92	799.382.180	20	600.000.000	5,25	-	4,52	-	4,47	7.480.000,00	4,91	-	19,5	7.480.000,00	95,75%	1,25%	97,07	806.672.180,00	97,07%	41,91%
		Jumlah kasus pra-hospital dan P3K yang mendapatkan pelayanan	1000	1.978.100.000	2106	2.184.867.958,4	200	550.000.000	199	695.480.576,00	205	922.335.809,00	174	364.859.375,00	10	404.329.319,00	588	2.386.885.079,00	294,00%	433,94%	2694	4.571.553.037,40	269,40%	231,11%
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase kasus DBD yang dilayani	100	9.723.000.000	80	2.961.159.540	20	2.500.000.000	5	-	5	477.321.000,00	5	23.782.000,00	5	2.843.019.415,00	20	3.347.122.415,00	100,00%	133,88%	100	6.308.281.955,00	100,00%	84,88%
		Persentase Penderita PTM yang dilayani	100	1.696.400.000	22,73	619.580.541	20	500.000.000	1,05	-	0,96	-	0,94	-	1,24	91.930.000,00	4,19	91.990.000,00	20,95%	16,40%	26,92	711.550.541,00	26,92%	41,04%
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang diakreditasi	20	6.034.180.000	22	1.930.719.261	10	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	145.344.120,00	0	145.044.120,00	0%	14,50%	22	2.075.763.381,00	110,00%	34,40%
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta PBI (Orang)	97500	31.300.000.000	6564	13.519.713.516	2180	7.500.000.000	5306	2.610.921.300,00	5428	2.050.706.700,00	5720	7.415.951.700,00	44175	13.643.681.354,00	60628	25.921.281.054,00	2781,14%	345,62%	67193	39.440.974.570,00	689,16%	126,01%
		Jumlah peserta jampersal yang dilayani	750	10.595.947.000	484	3.847.391.871	150	2.000.000.000	16	-	23	100.602.900,00	16	54.695.900,00	4	208.159.000,00	59	363.457.800,00	39,33%	18,17%	543	4.210.849.671,00	72,40%	39,74%
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan di puskesmas	11650	81.037.969.000	9320	46.693.991.398	2330	21.791.080.000	0	-	0	-	0	-	2330	11.474.659.100,67	2330	11.474.659.100,67	100,00%	52,86%	11650	58.168.650.498,67	100,00%	71,78%
		Persentase SPM kesehatan	100	4.539.567.000	52,97	2.393.657.453	20	1.177.585.000	3,35	-	2,76	-	2,49	-	4,19	126.348.200,00	12,79	126.849.200,00	63,96%	10,77%	65,76	2.520.506.653,00	65,76%	55,52%

		Presentase SPM kesehatan	100	65.809.959.000	52,97	36.996.695.044	20	17.071.399.000	3,35	-	2,76	-	2,49	-	4,19	8.960.582.642,00	12,79	8.960.582.642,00	63,95%	52,49%	65,76	45.957.277.686,00	65,76%	69,83%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	9.912.476.000	4	4.487.373.230	1	2.571.343.000	0	117.717.571,00	0	750.228.070,00	0	395.653.605,80	1	463.566.892,80	1	1.757.169.139,80	100,00%	68,34%	5	6.244.539.369,80	100,00%	63,00%
		Jumlah layanan di UPT (FK dan pelayanan pendistribusian obat dan BMHP bagi Puskesmas (Jenis)	5	1.314.762.000	4	792.021.054	1	341.055.000	0	9.757.388,00	0	95.625.399,00	0	70.884.110,00	1	231.249.900,00	1	407.516.797,00	100,00%	119,49%	5	1.199.537.851,00	100,00%	91,24%
		Jumlah anak berkebutuhan khusus yang dilayani (Orang)	860	6.300.000.000	505	2.107.091.479	240	2.200.000.000	164	187.574.039,00	159	326.428.489,00	0	-	0	503.639.778,00	323	1.017.842.306,00	134,58%	46,26%	828	3.124.733.785,00	96,29%	49,60%
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan distribusi logistik	135	1.191.829.000	106	595.320.309	27	309.186.000	0	9.800.000,00	0	36.690.012,00	0	39.884.500,00	27	42.498.750,00	27	128.653.262,00	100%	41,88%	135	724.173.571,00	100,00%	60,76%
																			167,91%	92,29%		117,30%	69,33%	
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI		2.231.150.000,00		698.648.662,00		860.000.000,00		-		89.254.000,00		-		180.937.000,00	0	270.191.000,00	0%	32%	0	688.736.662,00	0%	39,84%
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	430	1.205.400.000,00	180	295.372.025,00	150	500.000.000,00	0	-	0	-	0	-	70	44.852.500,00	70	44.852.500,00	47%	6,93%	250	330.024.525,00	58,14%	27,38%
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	135	1.025.750.000,00	106	313.173.537,00	27	380.000.000,00	0	-	0	89.254.000,00	0	-	27	136.284.500,00	27	225.538.500,00	100%	64,44%	135	538.712.037,00	100,00%	62,52%
																			73,33%	36,69%		78,07%	39,96%	
																			Sedang	Sangat Rendah		Tinggi	Sangat Rendah	
		PENERBITAN IZIN RS KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.330.900.000,00		477.217.891,00		400.000.000,00		12.000.000,00		20.844.000,00		-		62.768.026,00	0	96.730.026,00	0%	23,93%	0	672.947.716,00	0%	43,06%

	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kategori tenaga kesehatan terdapat (kelompok)	45	965.900.000,00	36	325.077.598,00	9	250.000.000,00	0	-	9	20.944.000,00	0	0	9	20.944.000,00	100%	8,38%	45	346.021.696,00	100,00 %	35,82%		
		Jumlah kategori puskesmas berprestasi (Puskesmas)	5		4		1		0		1		0	0	1		100%		5		100,00 %			
		Jumlah UPTD dengan penerapan PPK BLUD (Puskesmas)	21	366.000.000,00	13	152.140.093,00	5	150.000.000,00	5	12.000.000,00	0	-	0	4	62.786.025,00	9	74.786.025,00	180%	49,88%	22	226.926.116,00	104,76 %	62,17%	
																			126,67%	29,12%		101,69 %	49,00%	
																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	- Persentase Keteresediaan SDM Rumah Sakit - Persentase Keteresediaan SDM UPTD		6.804.800.000,00		1.119.940.395,00		2.399.600.000,00		-		-		187.064.000,00		489.737.873,00					1.796.741.969,00			
	PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN			1.000.000.000,00		386.759.050,00		300.000.000,00		-		-		46.996.000,00		113.361.000,00	0	0	0	0	547.116.050,00	0%	54,71%	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Penzinan Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah SIP tenaga kesehatan (izin)	5000	1.000.000.000,00	9329	386.759.050,00	1000	300.000.000,00	357	-	968	-	430	46.996.000,00	758	113.361.000,00	2113	180.357.000,00	211%	53,45%	11442	547.116.050,00	228,94 %	54,71%
																			211,30%	63,46%		228,94 %	54,71%	
																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SDM TINGKAT DAERAH KABUPATEN			4.804.600.000,00		733.181.335,00		2.099.500.000,00		-		-		140.068.000,00		378.378.573,00	0	0	0	0	1.249.825.909,00	0%	26,01%	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia	Jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	1038	4.804.600.000,00	417	733.181.335,00	257	2.099.500.000,00	15	-	8	-	0	140.068.000,00	78	378.378.573,00	102	516.444.573,00	39,69%	24,60%	519	1.249.825.909,00	50,00%	26,01%
																			39,69%	24,60%		60,00%	26,01%	
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM BEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			1.668.600.000,00		1.051.390.835,00		600.000.000,00		26.902.600,00		40.217.600,00		32.998.000,00		19.827.000,00					1.232.193.636,00			
	PENEBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR PIRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTEUTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA			1.668.600.000,00		1.051.390.835,00		500.000.000,00		26.902.600,00		40.217.600,00		32.998.000,00		19.827.000,00	0	0	0	0	1.232.193.635,00	0%	73,93%	

	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PanganIRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Produksi	Jumlah sarana yang dilakukan pemeriksaan	1500	1.686.600.000,00	1034	1.051.360.835,00	300	600.000.000,00	84	28.902.500,00	58	40.217.500,00	104	92.886.000,00	54	16.827.000,00	300	180.833.000,00	100,00%	36,17%	1334	1.232.193.635,00	88,93%	73,93%			
																			100,00%	36,17%			88,93%	73,93%			
																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sedang			
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah																									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah		212.449.890.000,00		80.177.834.359,19		104.396.639.000,00		16.876.160.320,00		23.767.964.813,00		24.960.316.746,00		41.679.640.529,39		107.072.972.400,39					107.260.606.787,67				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Dan Keuangan Dinas Kesehatan		66.604.377.000,00		-		66.604.377.000,00		14.262.116.566,00		19.496.929.914,00		19.996.772.116,00		21.706.016.799,90		76.320.834.394,90					76.320.834.394,90				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DKH dan Puskesmas	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN (Bulan)	14	65.504.377.000,00		-		65.504.377.000,00	3	14.262.116.566,00	4	19.496.929.914,00	4	19.996.772.116,00	3	21.706.016.799,90	14	75.320.834.394,90	100%	114,99%	14	75.320.834.394,90	100,00%	114,99%			
																			100,00%	114,99%			100,00%	114,99%			
																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kedepolimer Aparatur		21.242.676.000,00		6.807.324.942,00		6.496.000.000,00		662.894.899,00		666.063.067,00		1.141.836.206,00		3.766.191.919,00	0	6.116.967.892,00	0%	112%	0		12.923.292.834,00	0%	60,84%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun	30	76.500.000,00	20	30.988.850,00	6	26.000.000,00	0	-	0	-			0	-	0%	0,00%	20			30.988.850,00	66,67%	40,48%			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	56	7.100.000.000,00	26	1.471.256.257,00	16	1.500.000.000,00	0	-	4	119.234.500,00	0	-	4	119.234.500,00	27%	7,66%	30			1.590.490.757,00	53,57%	22,40%			
		Jumlah pengadaan peralatan kantor DKH dan puskesmas	54	4.800.000.000,00	27	1.022.066.060,00	15	460.000.000,00	0	-	5	49.048.000,00	0	-	3	163.870.000,00	9	212.916.000,00	53%	47,32%	35		1.234.924.060,00	84,81%	25,73%		
		Jumlah pengadaan peralatan kantor Diklat dan Puskesmas	26	1.800.000.000,00	2	247.984.000,00	25	1.800.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	159.742.000,00	1	159.742.000,00	4%	8,87%	3		407.726.000,00	12,00%	22,65%		
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi (artik)	215	995.000.000,00	164	461.618.240,00	43	230.000.000,00	0	-	57	54.128.530,00	0	32.956.000,00	0	74.447.450,00	57	161.531.960,00	133%	70,23%	221		623.150.220,00	102,79%	66,25%		
		Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta	134150	1.875.000.000,00	87746	736.028.730,00	26630	550.000.000,00	16943	508.315.199,00	8779	263.993.891,00	26641	1.000.526.631,00	113394	3.150.521.734,00	169757	4.922.757.255,00	618%	895,05%	233503		5.656.793.985,00	174,06%	301,80%		

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun	35	1.621.075.000,00	28	592.060.800,00	7	400.000.000,00	1	18.715.000,00	3	110.214.500,00	2	70.052.050,00	2	70.052.050,00	8	269.033.600,00	114%	97,26%	36	861.094.400,00	102,86%	53,12%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kepala dinas, sekretaris, 4 kepala bidang dan umum	8	115.000.000,00	6	51.920.000,00	2	30.000.000,00	2	-	0	5.600.000,00	1	6.230.000,00	0	10.220.000,00	3	22.050.000,00	150%	73,50%	9	73.870.000,00	112,50%	64,23%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang dibagikan rapat rapat koordinasi konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	665	2.900.000.000,00	664	2.193.584.005,00	166	500.000.000,00	20	35.864.500,00	39	54.433.846,00	39	32.073.527,00	44	126.328.684,00	142	248.700.557,00	98%	49,74%	606	2.442.284.562,00	91,07%	84,22%		
																			131,68%	136,66%			96,70%	75,54%		
																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Tinggi		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Kesehatan		8.080.636.000,00		4.402.404.954,00		1.388.240.000,00		99.242.390,00		328.426.239,00		216.121.306,00		440.961.969,00	0	1.082.760.894,00	0%	78%	0	6.486.166.848,00	0%	68,06%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun	240	2.961.000.000,00	192	1.304.598.422,00	48	755.000.000,00	12	-	12	109.957.550,00	12	91.132.531,00	12	176.763.632,00	48	377.853.713,00	100%	50,05%	240	1.682.452.135,00	100,00%	56,82%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penggunaan Bahan Perawatan Kebersihan kantor	5	970.000.000,00	4	869.176.453,00	1	250.000.000,00	0	50.903.288,00	0	126.019.036,00	0	52.980.122,00	1	51.851.539,00	1	281.753.985,00	100%	112,70%	5	950.930.438,00	100,00%	98,03%		
		Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun	105	4.129.636.000,00	77	2.428.630.079,00	21	383.240.000,00	0	47.339.102,00	0	92.448.853,00	0	71.008.853,00	21	212.348.786,00	21	423.143.186,00	100%	110,41%	98	2.851.773.275,00	93,33%	69,06%		
																			100,00%	91,06%			97,78%	74,64%		
																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur		17.318.016.000,00		8.822.901.113,00		4.936.000.000,00		331.176.632,00		719.137.762,00		676.989.989,00		1.758.154.470,49	0	3.984.357.893,49	0%	70%	0	12.007.168.986,49	0%	68,33%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perpanjangannya STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun	1166	449.500.000,00	514	245.562.410,00	240	85.000.000,00	40	-	6	26.811.030,00	30	4.849.800,00	79	19.856.450,00	155	51.517.080,00	64,56%	60,61%	669	297.079.490,00	57,38%	66,09%		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pansiring Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional (unit)	1166	6.500.000.000,00	447	3.985.949.621,00	240	1.750.000.000,00	70	299.869.832,00	30	557.693.207,00	20	311.037.799,00	30	507.662.234,00	150	1.676.263.072,00	62,50%	85,79%	597	5.642.212.693,00	51,20%	86,80%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (Unit)	51	5.600.000.000,00	24	2.846.941.157,00	10	1.500.000.000,00	0	-	2	98.547.045,00	0	-	12	961.481.264,81	14	1.080.028.309,81	140,00%	70,97%	38	3.908.869.466,81	74,51%	69,77%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	1000	4.788.518.000,00	631	1.564.447.925,00	200	1.500.000.000,00	41	31.305.800,00	41	36.086.500,00	71	260.002.600,00	47	269.154.521,68	200	596.549.421,68	100,00%	39,77%	831	2.160.997.346,68	83,10%	45,32%		
																			91,77%	66,71%			66,69%	66,69%		
																			Sangat Tinggi	Sedang			Sedang	Sedang		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase kualitas layanan puskesmas BLUD		100.323.286.000,00		60.345.103.360,18		27.172.921.000,00		1.620.722.034,00		2.577.418.811,00		3.051.695.117,00		13.919.225.382,00	0	21.189.061.344,00	0%	78%	0	81.514.164.694,18	0%	61,26%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan puskesmas	636	100.323.286.000,00	659	60.345.103.360,18	178	27.172.921.000,00	0	1.620.722.034,00	0	2.577.418.811,00	0	3.051.695.117,00	178	13.919.225.382,00	178	21.189.061.344,00	100%	77,90%	836	81.514.164.694,18	100,00%	61,26%		
																			100,00%	77,90%			100,00%	61,26%		
																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		
			886.049.618.000	269.170.012.720	202.291.666.000	21.991.426.626	29.604.123.492	42.893.429.599	117.906.890.921	212.094.670.629																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																			115,89%	76,04%			100,10%	65,16%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang		

3.1 Penjabaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja yang Telah dilaksanakan

Dari tabel 3.1 Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021 di atas merupakan evaluasi Renja sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 115,89%
2. Predikat Kinerja Sangat Tinggi

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indikator program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2021 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2021) adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang kinerja/hasil keluaran termasuk kategori Sangat Tinggi adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Pembangunan Puskesmas
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
			Pengadaan Obat, Vaksin
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Penerbitan Izin RS Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produksi
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DKK dan Puskesmas
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
--	--	----------------------------	--

2. Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang kinerja/hasil keluaran termasuk kategori Tinggi adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang kinerja/hasil keluaran termasuk kategori Sedang adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4. Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang kinerja/hasil keluaran termasuk kategori Rendah adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan

2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5. Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang kinerja/hasil keluaran termasuk kategori Sangat Rendah adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk

			Terdampak Krisis Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis SDM Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja/hasil keluaran adalah sebagai berikut :

- a. Sejak Tahun 2020 sampai dengan akhir Tahun 2021 Kota Balikpapan mengalami krisis kesehatan ditandai dengan terdampaknya pandemi akibat Covid – 19. Hal ini tentunya membuat pemerintah kota Balikpapan melakukan

penyusunan strategi kembali dalam rangka pengendalian penyebaran virus Covid – 19 termasuk di dalamnya melakukan refocusing beberapa kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan di tahun 2021 kepada alokasi kegiatan berfokus pada pencegahan, pengendalian dan pengobatan pasien terinfeksi Covid – 19.

- b. Pada awal berlangsungnya infeksi pandemic Covid – 19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit Covid – 19 dan dianggarkan melalui alokasi anggaran Kementerian Kesehatan dan di transfer langsung ke Tenaga Kesehatan yang menangani Covid 19.
 - c. Perlu dijelaskan juga bahwa pada tahun 2021 beberapa kebijakan dari Pemerintah Pusat diturunkan oleh Pemerintah Kota melalui surat edaran terkait beberapa pelaksanaan kegiatan yang tetap memperhatikan pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit Covid – 19 yakni menerapkan protocol kesehatan dengan segenap konsekuensi dalam teknis pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Dampak terhadap capaian program Renstra Dinas Kesehatan adalah :
- a. Beberapa program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016-2021 pada tahun keempat tidak dapat dilaksanakan
 - b. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada realisasi target kinerja baik indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan
5. Langkah dalam mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target adalah sebagai berikut:
- a. Koordinasi yang baik antar unit kerja di dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi capaian kinerja sehingga eksekusi bisa dilaksanakan segera di tingkat Bidang/Seksi dan Bagian. Hal ini memudahkan bagian program perencanaan melakukan pengendalian, evaluasi dan melakukan approve secara sistem.
 - b. Koordinasi yang terus harus berjalan harmonis dengan Tim Bappeda Kota Balikpapan, Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan, Inspektorat Kota Balikpapan, BPKD Kota Balikpapan, Bagian Pembangunan Kota Balikpapan dalam hal ketersediaan segenap komponen – komponen harus ditetapkan dengan regulasi SHH dan SBU.
 - c. Frekuensi perubahan dan pergeseran agar diminimalisir kecuali beberapa hal yang dalam kategori urgent untuk dilaksanakan.

- d. Keterbatasan tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya diusulkan pengadaan Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui DAK Non Fisik tahun 2021.

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2021, ditemui beberapa faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Faktor pendorong dan penghambat dimaksud adalah sebagai berikut :

4.1 Faktor Pendorong

- a) Koordinasi dan Kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
- b) Komitmen bersama dari stakeholder di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
- c) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku

5.2 Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja/hasil keluaran adalah :

- a) Sejak awal Pandemi tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 Kota Balikpapan mengalami krisis kesehatan ditandai dengan terdampaknya pandemi akibat Covid – 19. Hal ini tentunya membuat pemerintah kota Balikpapan melakukan penyusunan strategi kembali dalam rangka pengendalian penyebaran virus Covid – 19 termasuk di dalamnya melakukan refocusing beberapa kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan di tahun 2020 kepada alokasi kegiatan berfokus pada pencegahan, pengendalian dan pengobatan pasien terinfeksi Covid – 19.
- b) Pada awal berlangsungnya infeksi pandemic Covid – 19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit Covid – 19 dan dianggarkan melalui alokasi anggaran Kementerian Kesehatan yang di Transfer langsung ke Tenaga kesehatan yang terlibat menangani Covid 19.
- c) Tahun 2021 beberapa kebijakan dari Pemerintah Pusat diturunkan oleh Pemerintah Kota melalui surat edaran terkait beberapa pelaksanaan kegiatan yang tetap memperhatikan pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit Covid – 19 yakni menerapkan protocol kesehatan dengan segenap konsekuensi dalam teknis pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Demikian Laporan Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021 yang telah kami susun sesuai dengan format penyusunan. Terdapat beberapa kegiatan yang belum bisa terlaksana secara maksimal menyesuaikan dengan kondisi pandemic Covid – 19 di Kota Balikpapan. Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian terkait dengan pencapaian program yang tidak sesuai dengan target antara lain sebagai berikut :

- a) Upaya akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan antar lintas program tetap dilaksanakan melalui koordinasi, kolaborasi dan inovasi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
- b) Komitmen pimpinan beserta tim kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja sesuai sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

5.2 Rekomendasi

- a) Mengikutsertakan aparatur penyusunan program dan kegiatan dalam pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran.
- b) Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana sesuai realisasi.
- c) Proses pergeseran atau perubahan anggaran yang bersifat dinamis dengan frekuensi yang diharapkan semakin berkurang hingga tercapai keseimbangan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga bisa terlaksana tanpa banyak deviasi.
- d) Komponen belanja yang semakin detail tersajikan membuat para perencana akan lebih mudah dalam merencanakan pelaksanaan pembelanjaan kegiatan.

Kepala Dinas Kesehatan,

Andi Sri Juliarty



DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN
© 023